

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Penelitian

Kegiatan ekonomi dilakukan oleh pelaku-pelaku ekonomi, baik perorangan yang menjalankan perusahaan maupun badan-badan usaha, baik yang mempunyai kedudukan sebagai badan hukum atau bukan badan hukum,<sup>1</sup> yang bermaksud atau bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Akan tetapi, tidak semua kegiatan ekonomi menghasilkan keuntungan.<sup>2</sup>

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Sri Redjeki Hartono yang menyatakan bahwa kegiatan ekonomi pada hakikatnya adalah kegiatan menjalankan perusahaan, yaitu suatu kegiatan yang mengandung pengertian bahwa kegiatan yang dimaksud harus dilakukan : (1) secara terus menerus dalam pengertian tidak terputus-putus; (2) secara terang-terangan dalam pengertian sah (bukan *illegal*); dan (3) kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka memperoleh keuntungan, baik untuk diri sendiri atau orang lain.<sup>3</sup>

Suatu perusahaan keberadaannya selalu di dalam masyarakat dan perusahaan hanya dapat hidup, tumbuh dan berkembang apabila memperoleh dukungan dari masyarakat, karena pada dasarnya masyarakatlah yang merupakan pemasok utama kebutuhan perusahaan dan juga sekaligus sebagai pemakai produk (barang dan jasa) dari perusahaan. Jadi, keberadaan dan kelangsungan kehidupan perusahaan itu sangat bergantung dan ditentukan oleh sikap masyarakat terhadap institusi/lembaga yang bersangkutan. Oleh karena itu, perlu dipertanyakan

---

<sup>1</sup> Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, CV Mandar Maju, 2000, halaman 4.

<sup>2</sup> K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*, Kanisius, Yogyakarta, 2000, halaman 147.

<sup>3</sup> Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selekta .....Loc cit.* Dalam R. Soekardono, *Hukum Dagang Ind Jilid I ( Bagian Pertama )*, Dian Rakyat, Jakarta, 1983, halaman 20 dinyatakan bahwa barulah dapat dikatakan adanya perusahaan, apabila pihak yang berkepentingan bertindak secara tidak terputus-putus dan terang-terangan serta di dalam kedudukan tertentu untuk mendapatkan laba bagi dirinya. Hal senada juga dikemukakan oleh Molengraaff yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut secara terus menerus bertindak keluar untuk memperoleh penghasilan dengan memperniagakan atau menyerahkan barang-barang atau mengadakan perjanjian-perjanjian perniagaan.

seberapa jauh suatu perusahaan dapat memberi nilai manfaat kepada masyarakat lingkungannya.<sup>4</sup>

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa pada dasarnya antara perusahaan yang menjalankan kegiatan ekonomi dengan masyarakat mempunyai hubungan timbal balik, dan keduanya berada di dalam keadaan saling bergantung. Masyarakat membutuhkan perusahaan yang memproduksi barang atau jasa yang dibutuhkan dan perusahaan membutuhkan masyarakat, karena dalam masyarakat tersebut perusahaan memperoleh sumber daya. Kegiatan ekonomi yang terjadi di dalam masyarakat pada hakekatnya merupakan rangkaian berbagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh antarpribadi, antar perusahaan, antarkelompok, dan antarnegara, serta antara pribadi dengan perusahaan, kelompok atau negara.

Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perusahaan (*corporate*) sangat simultan, sehingga dapat menimbulkan atau melahirkan berbagai dampak atau akibat hukum yang sangat luas, baik di bidang politik, sosial, ekonomi maupun budaya. Sebelum menjalankan usahanya suatu perusahaan harus dinyatakan sah (*legal*) terlebih dahulu seperti; harus adanya Surat Ijin Usaha Industri (SIUI) untuk sektor industri atau Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk sektor perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Para pihak yang mengadakan hubungan hukum bertanggung jawab baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan jenis perjanjian, objek maupun luas cakupannya, dan wilayah berlakunya.<sup>5</sup>

Perusahaan yang selalu berhubungan dengan masyarakat itu dalam menjalankan kegiatan ekonominya dituntut adanya tanggung jawab, yang sering disebut dengan tanggung jawab produk. Tanggung jawab produk merupakan terjemahan dari istilah asing “*product(s) liability*” atau “*product(en) aansprakelijkheid*” sekalipun lebih tepat diterjemahkan sebagai “tanggung jawab

---

<sup>4</sup> Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selekta* ..... *op cit*, halaman 5.

<sup>5</sup> *Loc cit*.

produsen” yakni istilah Jerman yang sering digunakan dalam kepustakaan, yaitu “*Produzenten-haftung*”.<sup>6</sup>

Tanggung jawab produk adalah tanggung jawab para produsen untuk produk yang telah dibawahnya atau dimasukkannya ke dalam peredaran, yang menimbulkan/menyebabkan kerugian karena cacat yang melekat pada produk tersebut. Tanggung jawab tersebut dapat berupa tanggung jawab yang berdasarkan perjanjian/kontraktual maupun tanggung jawab yang berdasarkan perbuatan melawan hukum.

Penerapan tanggung jawab produk pada umumnya digunakan tiga saluran/klasifikasi yaitu <sup>7</sup> : (1) *negligance* (kurang cermat), yaitu perilaku yang tidak sesuai dengan standar kelakuan (*standard of conduct*) yang ditetapkan dalam undang-undang demi perlindungan anggota masyarakat terhadap risiko yang tidak rasional; (2) *breach of warranty* (pelanggaran janji); dan (3) tanggung jawab risiko atau tanpa kesalahan (*strict liability*).

Dalam hal tanggung jawab berdasarkan perjanjian, maka kewajiban untuk membayar ganti rugi tidak lain daripada penerapan norma perjanjian, yakni suatu norma hukum di mana kedua belah pihak dengan suka rela tunduk lewat perjanjian yang telah disepakati. Dalam hukum perjanjian dikenal asas bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya<sup>8</sup>.

Dalam hal tanggung jawab berdasarkan undang-undang, kerugian harus diganti (sering disebut dengan ganti rugi) karena pelanggaran suatu norma hukum (perintah dan larangan).<sup>9</sup>

Dari perspektif yuridis, dikenal adanya 2 (dua) konsep ganti rugi,<sup>10</sup> yaitu:

- 1) konsep ganti rugi karena wanprestasi kontrak/perjanjian;

---

<sup>6</sup> Agnes M. Toar, *Tanggung Jawab Produk dan Sejarah Perkembangannya di Beberapa Negara*, Dewan Kerjasama Ilmu Hukum Belanda Dengan Indonesia Proyek Hukum Perdata, Ujung Pandang, 1989, halaman 1.

<sup>7</sup> *Ibid*, halaman 6

<sup>8</sup> Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

<sup>9</sup> KPH Hapsoro Jayaningprang, *Perbuatan Melawan Hukum*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1989, halaman 1.

<sup>10</sup> Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, halaman 133.

- 2) konsep ganti rugi karena perikatan berdasarkan undang-undang termasuk ganti rugi karena perbuatan melawan hukum.

Dalam perkembangannya, perihal tanggung jawab perusahaan menunjukkan bahwa suatu perusahaan tidak hanya bertanggung jawab secara yuridis saja yang berupa tanggung jawab hukum, akan tetapi juga harus bertanggung jawab sosial. Tanggung jawab yang bersifat intern dan ekstern tersebut dapat berwujud tanggung jawab yuridis dan tanggung jawab sosial.

Tanggung jawab sosial perusahaan (selanjutnya dalam disertasi ini disingkat TJSP) atau *Corporate Social Responsibility* (dalam tulisan ini disingkat CSR) adalah tanggung jawab moral perusahaan terhadap masyarakat. Tanggung jawab moral perusahaan tentu bisa diarahkan kepada banyak hal seperti, kepada dirinya sendiri, kepada para karyawan, kepada perusahaan lain, pemasok, konsumen, penyalur, media massa, masyarakat sekitar, pemerintah dan lain-lain

.<sup>11</sup>

Dalam kancah dunia, masih kita ingat tragedi Bhopal di India tahun 1984 yang mengakibatkan ribuan orang meninggal karena adanya kebocoran gas beracun, berbagai kasus pencemaran lingkungan di dunia karena tumpahnya minyak di perairan (laut). Puluhan ribu mobil yang telah beredar di pasaran ditarik karena terdapat kesalahan teknis, dan masih banyak kasus-kasus yang terjadi akibat kurang perhatiannya perusahaan pada *stakeholder*.<sup>12</sup>

Pada skala lokal, kasus Tobapulp Lestari di Sumatera Utara yang diisukan menebang kayu dengan membabitkan di sekitar danau Toba dan mengakibatkan danau tersebut semakin dangkal, kasus kontroversial Buyat di Sulawesi Utara, isu pencemaran lingkungan di perairan teluk Jakarta baru-baru ini yang mengakibatkan ikan-ikan dari perairan Jakarta menjadi tidak layak dikonsumsi. Kasus lain yaitu, isu gagalnya panen dan munculnya rasa gatal-gatal yang dialami para petani dan juga pelan-pelan membuat biota air menjadi mati seperti ikan, kijang, dan keong yang terjadi di Kampung Sukamulya Desa Cilangkap Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta akibat sawahnya tersiram air

---

<sup>11</sup> K. Bertens, *Pengantar Etika*..... op cit, halaman 292.

<sup>12</sup> Simon Zadek, *The Path to Corporate Responsibility*, Forum MM UGM, Yogyakarta, 2004, halaman 1–2.

limbah yang berasal dari areal pabrik PT Indo Bharat Rayon (perusahaan serat rayon) <sup>13</sup> dan lain-lain.

Di Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 15 (lima belas) sungai besar dalam status rusak karena tercemar limbah organik dan logam berat akibat aktivitas perkebunan sawit, penambangan timah dan kaolin. Akibat dari kegiatan tersebut air di 15 (lima belas) sungai tersebut dikategorikan sudah tak layak dikonsumsi masyarakat.<sup>14</sup>

Di Banjarmasin, sekitar 100 warga dari 18 rukun tetangga di Kecamatan Banjar Barat, Banjarmasin berunjukrasa di jalan Zafri Zam-zam yang melarang truk pengangkut batubara dan bijih besi melintasi jalan di wilayah permukiman warga. Para warga berunjukrasa karena sudah tidak tahan lagi menghadapi dampak dari operasi truk batu bara dan bijih besi itu, karena jalan jadi rawan kecelakaan, ketenangan warga terganggu, polusi debu batu bara, dan kerusakan jalan jadi bertambah parah.<sup>15</sup>

Di wilayah Jawa Tengah misalnya ada kasus perkelahian antar 2 (dua) kampung di kabupaten Tegal karena satu kampung tidak mau daerahnya dilalui oleh saluran pipa pembuatan ampas pabrik tahu dari kampung tetangganya yang baunya sangat menyengat, dan lain-lain.

Fenomena-fenomena dari kasus-kasus di atas, semuanya menyingkap tabir tuntutan atas tanggung jawab moral atau tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat lingkungan beroperasinya perusahaan. Perusahaan tidak boleh mengabaikan hak-hak yang dimiliki masyarakat sekitar, seperti hak untuk hidup nyaman tidak terganggu oleh kebisingan dan kehirupikukan yang timbul akibat aktivitas perusahaan, hak untuk menikmati udara dan lingkungan yang bersih dan sehat, bahkan perusahaan perlu memperhatikan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh lingkungan masyarakat sekitar.

Namun, di samping fenomena-fenomena yang mengurangi hak-hak masyarakat sekitar pada sisi lain beberapa perusahaan besar telah memperhatikan *stakeholders*, seperti misalnya, suatu perusahaan jamu telah menyediakan ratusan

---

<sup>13</sup> Tempo, *Majalah*, No. 02/XXXIII/10 – 16 Maret 2003.

<sup>14</sup> Kompas, *Harian Umum*, 23 April 2007, halaman, 24.

<sup>15</sup> *Ibid*, halaman 24.

bus untuk mengangkut para pedagang jamu yang berada di Jakarta dan sekitarnya untuk diangkut pulang mudik menjelang datangnya hari raya Idul Fitri. Suatu perusahaan rokok di Jawa Timur telah membangun berbagai program TJSP, mulai dari Program Mitra Produksi Sigaret (MPS), Mitra Tembakau dan Cengkeh (MTC), Program Bimbingan anak sampoerna, *Sampoerna Rescue* (program yang terkait dengan bantuan bencana alam), hingga pendirian *Sampoerna Entrepreneur Training Center*, dan *Sampoerna Foundation*. Suatu perusahaan rokok di Jawa Tengah telah banyak mengeluarkan dananya untuk program beasiswa mulai dari tingkat Sekolah Dasar, sampai ke Sekolah Menengah Atas dan Sarjana, serta kepeduliannya dalam hal pelestarian lingkungan melalui program-program penghijauan. PT Freeport Indonesia menjalankan komitmen sosialnya dalam berbagai program berkelanjutan untuk pengembangan masyarakat dan membangun kemitraan. Sejak April 1996, perusahaan menyisihkan 1% (satu persen) dari pendapatan kotornya untuk mendukung program-program pengembangan masyarakat berbasis desa sebagai wujud kepedulian yang didasarkan atas kebutuhan-kebutuhan masyarakat setempat.<sup>16</sup>

Dari hasil identifikasi yang dilakukan Direktorat Peningkatan Peran Kelembagaan Sosial Masyarakat dan Kemitraan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Departemen Sosial RI ditemukan bahwa sejumlah dunia usaha telah melaksanakan tanggung jawab sosialnya, tetapi sebagian besar diantaranya masih bersifat pragmatis, karena belum terjalinnya kerjasama secara sinergis antar dunia usaha dengan pemerintah. Akibatnya, masalah sosial yang

---

<sup>16</sup> Puspensos, *Investasi Sosial*, La Tofi, Jakarta, 2005, halaman 130. PT Freeport Indonesia, *Unsur-unsur Pembangunan Berkelanjutan, Laporan Berkarya Menuju Pembangunan Berkelanjutan*, 2005, halaman 5. PT Freeport Indonesia (PTFI) secara tidak langsung memberi kontribusi bagi Indonesia seperti hal-hal sebagai berikut : *Pertama*, investasi sejumlah hampir 4,8 miliar AS untuk membangun prasarana perusahaan di Papua, termasuk kota-kota, sarana pembangkit listrik, pelabuhan dan bandar udara, jalan, jembatan, terowongan, sarana pembuangan limbah, sistem komunikasi modern, dan prasarana lainnya yang kepemilikannya akan beralih ke pemerintah Indonesia pada saat kontrak berakhir; *kedua*, investasi sebesar lebih 425 juta dolar AS dalam bentuk prasarana sosial yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat setempat seperti gedung sekolah, rumah sakit, klinik kesehatan, perkantoran, sarana ibadah, sarana rekreasi dan pengembangan usaha kecil dan menengah; *ketiga*, penyediaan lapangan kerja secara langsung PTFI bagi sekitar 8.000 orang pada tahun 2005 yg lebih dari 2.000 orang, atau lebih dari 25 persen adalah putra daerah Papua; *keempat*, pembayaran upah bagi karyawan PTFI sendiri telah mencapai lebih dari 1 miliar dolar AS sejak tahun 1992, dan lain-lain.



diselesaikan umumnya masih bernuansa pragmatis, kurang komprehensif dan tidak sedikit diantaranya sebatas karitatif.<sup>17</sup>

Hal-hal di atas memperlihatkan kegiatan-kegiatan bisnis yang belum dan yang telah memperhatikan *stakeholder* dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan.

TJSP merupakan tanggung jawab moral perusahaan terhadap masyarakat di mana perusahaan menjalankan kegiatannya, baik masyarakat dalam arti sempit seperti lingkungan/masyarakat sekitar (*local community*) sebuah pabrik atau masyarakat luas, bahkan masyarakat global/dunia. TJSP ini diletakkan dalam tangan para manajer, karena tangan manajerlah yang akan menentukan suatu perusahaan merencanakan dan mengimplementasikan tanggung jawab sosialnya atau tidak. Keberadaan institusi tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility = CSR*) masih dalam perdebatan

Dalam menyikapi keberadaan TJSP, Pemerintah Republik Indonesia telah menuangkan beberapa bentuk tanggung jawab sosial dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti dalam Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan, Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan dan beberapa perundang-undangan lainnya.

Bahkan sejak tanggal 16 Agustus 2007 pemerintah RI secara tegas telah menetapkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan menjadi tanggung jawab yang sifatnya yuridis karena telah dpositifkan menjadi salah satu ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dalam disertasi ini disebut dengan UUPT) dan diperkuat dengan ancaman sanksi bagi Perseroan Terbatas yang melanggarnya.

Bab V UUPT berjudul “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan” Pasal 74 menyatakan:

---

<sup>17</sup> Direktorat Peningkatan Peran Kelembagaan Sosial Masyarakat dan Kemitraan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Departemen Sosial RI, *Acuan Jaringan Kerjasama Dunia Usaha Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial*, 2005, halaman 2-3.

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Tujuan pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ini adalah untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi Perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung terjalinnya hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat, maka ditentukan bahwa Perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Untuk melaksanakan kewajiban Perseroan tersebut, kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Kegiatan tersebut dimuat dalam laporan tahunan Perseroan. Dalam hal Perseroan tidak melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan maka Perseroan yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>18</sup>

Memperhatikan pandangan-pandangan tentang TJSP dan dengan memanfaatkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan TJSP,

---

<sup>18</sup> Penjelasan Umum Undang-undang tentang Perseroan Terbatas (Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007).



maka di bawah ini dapat dikemukakan/disajikan *teoritical* atau *research gab* dalam bentuk tabel.

Dari pandangan-pandangan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan di atas, ternyata masih menunjukkan adanya pro dan kontra atau paling tidak masih adanya perbedaan pandangan. Oleh karena itu, sangatlah tepat apabila permasalahan tentang TJSP tersebut dicari jawabannya dalam praktik-praktik di perusahaan.

Perusahaan-perusahaan baik yang berskala besar, menengah, atau pun kecil sering muncul, tumbuh dan berkembang, yang perannya terhadap daerah sangat besar, khususnya di bidang penyerapan tenaga kerja. Dengan meningkatnya jumlah perusahaan dan adanya pelaksanaan tanggung jawab, baik tanggung jawab hukum maupun tanggung jawab sosial, akan sangat berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat, karena akan banyak kesempatan untuk menampung tenaga kerja dan pemberdayaan masyarakat.

Di kabupaten Kudus dikenal sebagai kota industri karena di wilayah ini tumbuh berbagai industri baik yang berskala besar, menengah, kecil maupun mikro, . Sampai tahun 2006 usaha industri di kabupaten Kudus mencapai 13.432 unit yang terdiri dari usaha besar, menengah, kecil, dan mikro.

Latar belakang masalah di atas mendorong dilakukannya penelitian dengan judul “Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) di kabupaten Kudus”.

## **2. Perumusan Masalah**

Dengan memperhatikan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas, maka permasalahan yang dibahas dirumuskan sebagai berikut.

- 1) Bagaimana implementasi tanggung jawab sosial perusahaan atau TJSP (*Corporate Social Responsibility* atau *CSR*) ?
- 2) Faktor-faktor apakah yang mendorong suatu perusahaan mengimplementasi-kan tanggung jawab sosialnya ?

### 3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian ilmiah, sekecil apa pun pasti mempunyai tujuan yang ingin dicapai oleh si peneliti. Penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti berusaha memperoleh sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan. Mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam sesuatu yang ada, sedangkan menguji kebenaran dilakukan jika pengetahuan sudah ada tetapi masih diragukan kebenarannya.

Penelitian yang dilakukan ini merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan suatu pengetahuan, yaitu ingin memperluas dan menggali lebih dalam lagi tentang TJSP atau CSR.

Dalam penelitian ini tujuan yang secara khusus ingin dicapai adalah sebagai berikut.

- 1) Mendapatkan informasi dan mengkaji lebih mendalam tentang implementasi tanggung jawab sosial perusahaan.
- 2) Mengetahui dan mengkaji lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mendorong suatu perusahaan mengimplementasikan tanggung jawab sosialnya.

Penelitian tentang pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) di kabupaten Kudus ini sekecil apa pun diharapkan akan dapat memberikan kontribusi baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan atau pun teknologi. Manfaat/kegunaan penelitian tersebut dapat berupa manfaat yang bersifat teoretikal maupun yang bersifat praktikal.

- 1) Manfaat Teoretikal

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menemukan konsep-konsep dan teori-teori atau asas-asas hukum baru, khususnya di lapangan Hukum Ekonomi atau Hukum Bisnis. Oleh karena itu, hasil penelitian ini akan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu hukum dan lebih khusus lagi di bidang Hukum Ekonomi.

- 2) Manfaat Praktikal

Secara praktik hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan (*input*) bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu perusahaan yang menjalankan kegiatannya di masyarakat, pemerintah daerah, dan masyarakat sekitar pada khususnya atau masyarakat luas pada umumnya. Masyarakat dapat bekerja sama dengan perusahaan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Pemerintah dapat menyusun regulasi tentang TJSP/CSR dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi pengangguran, menekan kemiskinan dan lain-lain. Perusahaan dengan hasil penelitian ini dapat berusaha mengimplementasikan TJSP/CSR dengan baik, terprogram dan bersinergi dengan pemerintah dan masyarakat, sehingga dapat membantu tugas-tugas pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

